

# Rakornas Produk Hukum Daerah Dorong Iklim Investasi yang Lebih Mudah

**Bombana, sultranet.com** - Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Forum ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”. Kegiatan berlangsung di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025), Kendari.

Rakornas dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya keselarasan regulasi di tingkat pusat dan daerah agar tidak menghambat arus investasi. “Produk hukum daerah harus menjadi instrumen yang mempermudah, bukan menghambat. Kita ingin setiap daerah menata regulasinya agar mendukung percepatan pembangunan,” ujar Mendagri.

Forum ini menjadi ruang konsolidasi nasional untuk menyeragamkan pemahaman terkait mekanisme pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepastian investasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat fungsi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai landasan kebijakan yang selaras dengan program strategis nasional, termasuk target Asta Cita Pemerintah Pusat.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menyambut baik pelaksanaan Rakornas tersebut. Menurutnya, penyelarasan kebijakan hukum daerah menjadi kunci penting agar pelayanan investasi dapat berjalan lebih sederhana. “Kita ingin Bombana terus berkembang. Untuk itu, regulasi harus memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bergerak dengan kepastian dan prosedur yang lebih jelas,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan DPRD, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah ini

diharapkan mampu mempercepat harmonisasi regulasi sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah. “Dengan regulasi yang baik, kita bisa membuka lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.

Rakornas tersebut dihadiri para menteri, gubernur, bupati dan wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta berbagai organisasi masyarakat. Kegiatan berjalan dinamis dengan sesi diskusi dan pemaparan teknis penyusunan produk hukum yang adaptif terhadap kebutuhan investasi.

Pemerintah melalui Kemendagri menegaskan bahwa percepatan layanan investasi harus ditopang oleh kapasitas regulasi daerah yang kuat dan responsif. Karena itu, Rakornas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui kebijakan yang berpihak pada kemudahan berusaha.

---

## **MENKRAF Buka Pameran Ekraf dan Pariwisata Sultra 2025**

**Kendari, sultranet.com** - Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Teuku Riefky Harsya, secara resmi membuka Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Pameran Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini menjadi rangkaian kegiatan dalam Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah. Ajang ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Melalui kegiatan ini, produk-produk lokal diberi panggung lebih luas untuk menembus pasar nasional hingga internasional.

Dalam sambutannya, Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya memperkuat peran pelaku kreatif daerah. “Ekonomi kreatif adalah masa depan. Daerah memiliki kekuatan budaya dan kreativitas yang perlu terus ditampilkan. Pemerintah berkomitmen mendukung agar produk lokal semakin berdaya saing,” ujarnya sebelum meninjau area pameran.

Usai pembukaan, MENKRAF bersama rombongan mengunjungi sejumlah stand UMKM yang menampilkan tenun khas Sultra, kerajinan tangan, serta beragam kuliner tradisional. Salah satu stand yang menjadi perhatian adalah Stand Dekranasda Kabupaten Bombana.

Kunjungan tersebut disambut hangat oleh Bupati Bombana, H. Burhanuddin, bersama Ketua Dekranasda Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa. Keduanya memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, mulai dari tenun Bombana, kerajinan berbahan lokal, hingga berbagai olahan kuliner khas. “Kami ingin menunjukkan bahwa Bombana tidak hanya kaya budaya, tetapi juga siap bersaing lewat produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Bupati Burhanuddin.

Ketua Dekranasda Bombana menambahkan bahwa keikutsertaan Bombana dalam pameran ini menjadi peluang memperluas jejaring dan membuka akses pasar. “Pameran seperti ini sangat penting untuk memperkenalkan karya pengrajin lokal kepada publik yang lebih luas,” kata Hj. Fatmawati Kasim Marewa.

Pameran Ekraf dan Pariwisata Sultra 2025 diharapkan mampu memperkuat kolaborasi lintas pemerintah serta meningkatkan eksposur produk lokal. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus mendorong UMKM dan pelaku kreatif agar dapat naik kelas, sekaligus mendukung pengembangan pariwisata daerah melalui inovasi dan promosi berkelanjutan.

---

## **Inspektorat Bombana Gelar Audit**

# Ketaatan OPD Semester I 2025

**Bombana, sultranet.com** - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Audit Ketaatan Semester I tahun 2025 terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeriksaan ini dipimpin langsung Inspektur Pembantu Wilayah III bersama tim auditor yang terbagi ke dalam dua kelompok. Audit dilakukan sepanjang bulan Agustus 2025.

Tim pertama diketuai Indra Jaya, S.IP. Mereka bertugas mengaudit empat OPD, yakni Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana. Sementara tim kedua dipimpin Andi Kamaruddin, S.Sos., dengan mandat mengaudit Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana.

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan kepada masyarakat, hingga belanja modal. Audit ini diharapkan menjadi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan sesuai aturan.

Inspektur Daerah Kabupaten Bombana, Ridwan, S.Sos., M.P.W menegaskan bahwa pelaksanaan audit ini memiliki dasar hukum yang jelas. "Audit ketaatan semester pertama ini dilaksanakan Inspektur Pembantu Wilayah III, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 23 Tahun 2007," ujar Ridwan.

Ia menambahkan, langkah ini bukan semata kewajiban administratif, tetapi juga upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya audit, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana perangkat daerah taat terhadap aturan pengelolaan anggaran dan administrasi publik.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah III, H. Akhmad Amin, S.Pd., M.Pd., menjelaskan audit ketaatan merupakan agenda rutin yang digelar Inspektorat setiap tahun. Audit tahun ini, kata dia, merujuk pada Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2-34 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan

Berbasis Risiko Inspektorat Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025.

“Setiap tahun audit ini kami lakukan sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko yang sudah ditetapkan Bupati. Untuk itu kami berharap para obrik yang diperiksa bisa proaktif dan selalu menyiapkan dokumen yang diminta tim Inspektorat, sehingga proses pemeriksaan berjalan lancar,” kata Akhmad Amin.

Audit ketaatan ini juga menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai kinerja OPD. Hasil audit nantinya diharapkan memberi rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Tujuannya bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program di setiap OPD benar-benar sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Pemeriksaan ini juga menjadi ruang belajar bersama. OPD yang diaudit diharapkan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, melainkan menjadikan audit sebagai cermin untuk memperbaiki pola kerja, khususnya dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

Inspektorat Bombana menegaskan komitmennya untuk menjaga objektivitas dalam setiap tahapan audit. Seluruh temuan akan dianalisis secara profesional, kemudian dituangkan dalam laporan resmi yang disampaikan kepada Bupati. Dengan demikian, hasil audit bisa menjadi rujukan dalam menyusun kebijakan pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah ke depan.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang semakin baik. Audit ketaatan bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi juga bentuk komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

---

**PLN    Paparkan    Arah    RUPTL**

# 2025-2034, Bupati Bombana Dorong Pemerataan Listrik di Sultra

**Kendari, sultranet.com** - Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri Diseminasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang mengangkat tema “Rencana Strategis PLN dalam Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Tenggara”. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, di Ballroom Phinisi Hotel Claro Kendari, Senin (25/8/2025).

Dalam forum itu, PLN bersama Kementerian ESDM memaparkan arah pengembangan kelistrikan satu dekade ke depan, termasuk strategi percepatan elektrifikasi dan penguatan jaringan di seluruh wilayah Sultra. Agenda ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan terkait layanan listrik.

Acara diseminasi ini diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero). Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan PLN dalam menyiapkan infrastruktur energi yang lebih merata, andal, dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh penguatan infrastruktur listrik sebagai fondasi pembangunan daerah. “Ketersediaan listrik yang stabil adalah kunci percepatan ekonomi Sulawesi Tenggara. Pemerintah provinsi akan terus mendorong kolaborasi dengan PLN dan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Bupati Bombana, Burhanuddin, menyampaikan bahwa Bombana membutuhkan peningkatan kapasitas listrik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan layanan publik. “Kami berharap rencana RUPTL ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama pemerataan listrik hingga wilayah terluar. Bombana terus berkembang dan membutuhkan dukungan infrastruktur energi yang kuat,” katanya.

Selain memaparkan rencana strategis, PLN juga menjelaskan sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan pembangkit energi baru terbarukan, perluasan jaringan distribusi, serta peningkatan rasio elektrifikasi di daerah yang masih minim akses listrik.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian ESDM, jajaran PT PLN, para bupati dan wali kota dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Bombana Iskandar, SP, Pj. Sekda Bombana, Kepala Dinas Perhubungan Bombana, dan Kepala Bappeda Bombana. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan energi yang merata dan berkeadilan.

Melalui diseminasi RUPTL ini, pemerintah dan PLN berupaya menyatukan langkah dalam memastikan ketersediaan listrik yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan sekaligus mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.

---

## **Inspektorat Bombana Lakukan Audit Ketaatan di Delapan OPD**

**Bombana, sultranet.com** - Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan Audit Ketaatan Semester I Tahun 2025 terhadap delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeriksaan ini dilakukan oleh Inspektur Pembantu Wilayah III sepanjang Agustus 2025, sebagai upaya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.

Audit lapangan dibagi dalam dua tim. Tim pertama dipimpin Indra Jaya, S.IP yang memeriksa empat OPD: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana. Sementara itu, tim kedua yang diketuai Andi Kamaruddin, S.Sos mengaudit Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana. Pemeriksaan mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan, pengadaan



# Pembukaan Gerakan Pangan Murah Sultra

**Kendari, sultranet.com** - Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si menghadiri pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Sulawesi Tenggara yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kegiatan yang digelar di Halaman Parkir Barat Eks MTQ Kota Kendari ini berlangsung pada Selasa (26/8/2025) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.

Gerakan Pangan Murah merupakan kolaborasi antara Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program ini digagas sebagai bagian dari upaya nasional untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau di tengah dinamika ekonomi yang memengaruhi harga kebutuhan pokok.

Pembukaan GPM Sultra dihadiri berbagai unsur penting, mulai dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pangan Nasional RI, Ketua Umum KADIN Indonesia, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, jajaran Forkopimda Provinsi Sultra, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, hingga perangkat daerah urusan ketahanan pangan kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa kegiatan GPM menjadi intervensi penting untuk menekan gejolak harga pangan. "Gerakan Pangan Murah ini adalah upaya nyata pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. Pemerintah daerah harus terus memperkuat sinergi agar stabilitas pasokan tetap terjaga," ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Bupati Bombana menyambut baik penyelenggaraan GPM Sultra dan menilai kehadiran program ini penting untuk membantu masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan warga. "Kami mendukung penuh langkah pemerintah pusat dan provinsi. Upaya seperti ini sangat membantu menjaga keseimbangan harga di

lapangan,” kata Burhanuddin.

Pelaksanaan GPM Sultra menghadirkan berbagai komoditas pangan dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar, seperti beras, minyak goreng, gula, telur, cabai, dan kebutuhan pokok lainnya. Intervensi harga dilakukan melalui kerja sama dengan pelaku usaha, distributor, BUMN sektor pangan, serta pemerintah daerah.

Selain sebagai bentuk stabilisasi, GPM juga menjadi bagian edukasi agar masyarakat memahami mekanisme pasar dan pentingnya menjaga pola konsumsi yang bijak. Pemerintah berharap program serupa dapat terus diperluas ke kabupaten/kota lain, termasuk Bombana, guna menjangkau lebih banyak masyarakat.

Pembukaan Gerakan Pangan Murah Sultra ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor usaha dalam memastikan ketahanan pangan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

---

## **Gala Dinner Rakornas Perkuat Komunikasi Antar Kepala Daerah**

**Kendari, sultranet.com** - Rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 resmi dimulai dengan penyelenggaraan Gala Dinner yang berlangsung di Pelataran Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Acara yang digelar pada Selasa (26/8/2025) ini dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, para gubernur se-Sulawesi, bupati/wali kota, ketua DPRD, serta pejabat kementerian lainnya.

Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si turut hadir sebagai bagian dari forum nasional tersebut. Kehadirannya tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat relasi antarpemimpin daerah. Melalui kesempatan ini, para kepala daerah dapat membangun komunikasi informal

mengenai tantangan dalam penyusunan produk hukum daerah yang sering kali memerlukan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor.

Acara pembuka Rakornas ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Para tamu disambut dengan suguhan kuliner khas Sulawesi Tenggara serta penampilan tarian tradisional yang menggambarkan kekayaan budaya lokal. Nuansa kehangatan semakin terasa ketika perbincangan antarpeserta mencair di berbagai sudut area jamuan.

Di sela kegiatan, Bupati Bombana menegaskan pentingnya forum seperti ini dalam memperkuat sinergi pemerintahan daerah. "Pertemuan informal seperti ini sangat berarti karena membuka ruang diskusi yang lebih cair tentang berbagai persoalan di daerah. Kita bisa saling berbagi perspektif dan mencari solusi bersama," ujarnya.

Tak hanya menjadi ajang silaturahmi, Gala Dinner juga menjadi momentum awal untuk memetakan isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Rakornas, terutama terkait penyusunan regulasi daerah yang efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antardaerah disebut menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika pembangunan.

Acara ditutup dengan penampilan artis asal kawasan timur Indonesia yang menambah semarak malam pembuka Rakornas. Para tamu terlihat menikmati rangkaian hiburan sembari melanjutkan percakapan ringan, menjadikan malam tersebut bukan hanya sebagai pembuka agenda nasional, tetapi juga sebagai wadah membangun kedekatan antarpemangku kepentingan.

Seluruh rangkaian pembukaan ini menjadi penanda dimulainya agenda Rakornas Produk Hukum Daerah yang dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan fokus penguatan kualitas regulasi daerah sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

---

# Kesbangpol Bombana Meriahkan HUT RI ke-80 dengan Aneka Lomba Kebersamaan

**Bombana, sultranet.com** - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kegiatan berlangsung di halaman Kantor Kesbangpol Bombana dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol, dr. Sunandar, MM.Kes, Senin (25/8/2025).

Rangkaian lomba yang diadakan tidak hanya menjadi ajang perayaan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat kebersamaan antarpegawai dan masyarakat. Suasana meriah tampak sejak pagi ketika peserta mulai memadati area kegiatan.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol, Sunandar, menyampaikan bahwa peringatan HUT RI harus menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus mempererat hubungan sosial. "Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun semangat kebersamaan dan mempererat silaturahmi dalam suasana yang penuh kegembiraan dan kebanggaan sebagai anak bangsa," ujarnya.

Berbagai perlombaan tradisional menjadi daya tarik utama, mulai dari lomba pecahkan balon, rebut kursi, tarik tambang, lari karung, bola dangdut, hingga lomba pasangan balon. Setiap cabang lomba diikuti dengan penuh antusias. Tawa dan sorak dukungan terdengar sepanjang kegiatan, menciptakan atmosfer kompetisi yang hangat dan inklusif.

Tidak hanya ASN Kesbangpol yang berpartisipasi, tetapi juga masyarakat sekitar yang turut memeriahkan suasana. Kehadiran warga membuat lomba semakin hidup dan memperkuat interaksi antara aparatur pemerintah dan masyarakat.

Panitia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kesbangpol Bombana untuk terus membangun semangat kebangsaan, gotong royong, dan kebhinekaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui lomba-lomba sederhana yang penuh keceriaan, nilai persatuan kembali ditegaskan kepada seluruh peserta.

Dengan suksesnya penyelenggaraan perlombaan ini, Kesbangpol Bombana berharap semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri masyarakat, sekaligus memperkuat harmonisasi sosial di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

---

## **Pemkab Umumkan Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi Tahun 2025 Tahap II**

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana resmi mengumumkan pelaksanaan program Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi tahun 2025 tahap II. Program yang dinanti ribuan mahasiswa asal Bombana ini kembali hadir sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap pendidikan dan masa depan generasi muda. (25/8)

Beasiswa ini diperuntukkan bagi mahasiswa asal Bombana yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di Sulawesi Tenggara maupun di luar daerah. Pemerintah daerah menegaskan, tujuan utama program ini adalah membantu mahasiswa agar tidak terhenti kuliahnya hanya karena persoalan biaya.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menyampaikan bahwa beasiswa tersebut bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan juga strategi jangka panjang untuk memperkuat sumber daya manusia di daerah. Ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada generasi muda.

“Beasiswa Bombana Berani dan Berani Berprestasi adalah komitmen kami untuk membuka jalan bagi putra-putri Bombana agar bisa terus belajar. Jangan sampai ada anak muda yang terhenti kuliahnya hanya karena persoalan biaya,” kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, pendidikan merupakan kunci kemajuan daerah. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa, mahasiswa

Bombana diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi tangguh, kreatif, dan berdaya saing. “Kami ingin melahirkan anak-anak Bombana yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga mampu membawa nama baik daerah di level nasional,” ujarnya.

Program beasiswa ini dibagi dalam dua kategori. Pertama, Beasiswa Bombana Berani yang ditujukan bagi mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi. Kedua, Beasiswa Berani Berprestasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dengan capaian akademik unggul. Dengan pola ini, pemerintah ingin memastikan kesempatan terbuka bagi semua mahasiswa, baik yang cemerlang secara prestasi maupun yang sedang berjuang dari keterbatasan.

Sejumlah mahasiswa penerima beasiswa tahap sebelumnya menyebut kebijakan ini sangat membantu. Mereka mengaku bisa melanjutkan kuliah dengan lebih tenang. “Kalau tidak ada beasiswa, mungkin saya sudah berhenti kuliah,” ungkap salah seorang penerima yang enggan disebutkan namanya.

Pemerintah Kabupaten Bombana juga menegaskan komitmen transparansi dalam pelaksanaan program ini. Panduan resmi yang berisi syarat administrasi, tahapan seleksi, hingga prosedur pencairan dana sudah disiapkan agar seluruh mahasiswa bisa mengakses informasi dengan mudah.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah benar-benar serius membangun pendidikan. Dengan generasi muda yang berpendidikan tinggi, Bombana optimistis mampu melahirkan masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

Burhanuddin menutup pesannya dengan dorongan moral kepada mahasiswa penerima. “Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk belajar. Karena di pundak kalian masa depan Bombana dititipkan,” tegasnya.

Program ini menegaskan Bombana bukan hanya sebagai daerah dengan potensi alam, tetapi juga sebagai daerah yang peduli membangun manusia. Dengan beasiswa ini, wajah Bombana diharapkan semakin dikenal sebagai daerah yang berani berinvestasi pada generasi muda. (adv)

**Isi pengumuman lengkap dibawah ini:**

[PANDUAN BEASISWA BERANI II 25](#)

---

# TPG Bombana Perkuat Konsolidasi untuk Tekan Angka Stunting

**Bombana, sultranet.com** - Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting melalui Zoom Meeting Konsolidasi dan Penguatan Tim Pengendali Genting (TPG) yang digelar serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini diikuti berbagai perangkat daerah, mulai dari DPPKB, Bappeda, Dinas Kesehatan, PMD, RSUD hingga Inspektorat, dan berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Kamis (28/08/2025).

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang turut hadir, menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menurunkan angka stunting secara terukur. "Upaya ini membutuhkan sinergi kuat antarinstansi. Semua pihak harus terlibat aktif dan memiliki semangat yang sama dalam penanganan masalah ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa partisipasi orang tua asuh dalam intervensi keluarga berisiko stunting berperan besar, terutama dalam pemberian nutrisi dan edukasi secara berkelanjutan.

Kepala DPPKB Bombana, Drs. H. Abdul Azis, M.Si., menyebut konsolidasi TPG sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi di lapangan. "Dengan forum ini, kita berharap pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," katanya. Ia meminta seluruh stakeholder mengusulkan program yang telah ada dalam APBD untuk diintegrasikan agar intervensi stunting dapat dimaksimalkan dalam perubahan anggaran.

Ia juga memaparkan berbagai kontribusi perangkat daerah, termasuk program Bina Keluarga Balita (BKB) serta Rencana Aksi Keluarga yang menekankan pentingnya peran keluarga dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Sementara Dinas Kesehatan disebut memperkuat intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan dan peningkatan layanan Posyandu.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE., menyoroti pentingnya

penggunaan data Posyandu sebagai dasar penetapan sasaran intervensi. “Data Posyandu lebih aktual dan berbasis lapangan sehingga mampu menggambarkan kondisi balita secara riil. Pendekatan ini strategis untuk memastikan intervensi tepat sasaran,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, TPG juga membahas evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), termasuk penguatan data, intervensi spesifik dan sensitif, serta pemantauan berkala di wilayah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor sebagai upaya mewujudkan generasi Bombana yang sehat, kuat dan berkualitas di masa depan.